Wakil Bupati Minta Pemerintah Pusat Perjuangkan Guru Lembaga Sekolah Swasta

Selasa, 5 April 2022

Wakil Bupati Pasuruan, Mujib Imron, meminta Pemerintah Pusat melalui Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan lembaga sekolah swasta. Ia menyampaikan hal ini merespon keluhan dari tenaga pengajar di sekolah swasta yang kehilangan guru terbaik mereka akibat banyaknya guru honorer yang memilih mendaftar seleksi PPPK formasi tenaga pendidikan. Wakil Bupati menggarisbawahi pentingnya peran lembaga swasta dalam sistem pendidikan nasional dan meminta pemerintah untuk memberikan bantuan pendanaan guna menjamin eksistensi mereka.

Ia juga mendesak Komisi X DPR RI untuk memberikan afirmasi terhadap disabilitas dan calon pendaftar PPPK dari segi usia, khususnya bagi mereka yang berusia 40-50 tahun. Selain itu, Wakil Bupati menekankan pentingnya afirmasi terhadap lama pengabdian calon tenaga pendidik.

Wakil Bupati Pasuruan, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR RI, juga menyampaikan masalah yang dihadapi tenaga pengajar di Kabupaten Pasuruan. Ia menyebutkan bahwa masih banyak guru berstatus non-PNS/honorer meskipun telah mengabdi selama puluhan tahun.

Ia meminta pemerintah pusat untuk memperjuangkan kesejahteraan guru honorer dan memberikan solusi bagi guru honorer yang telah lama mengabdi.

Wakil Bupati juga mendesak Komisi X DPR RI untuk mempertimbangkan revisi UU Sisdiknas terkait skema bantuan dana bagi lembaga swasta dan untuk mempertimbangkan kebutuhan tenaga pendidik di daerah, terutama di daerah dengan tingkat kesulitan akses pendidikan yang tinggi.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.